

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 telah menghilangkan *Lex Specialis* dari Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyebabkan kerugian bagi kreditur dimana tak dapat lagi terlindungi hak kreditur atas kerugian yang diderita nya. Dimana diharuskannya proses peradilan perdata yang begitu panjang dan banyak memakan waktu apabila Debitur tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana alternatif pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ? 2) Bagaimana konsep mengembalikan fungsi parate eksekusi dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia?. Penelitian tesis ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan peristiwa hukum yang diteliti ditemukan bahwa 1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dapat dijadikan sebagai alternatif dalam menyelesaikan suatu permasalahan eksekusi jaminan fidusia 2) Diperlukannya kehadiran Negara untuk melakukan eksperimentasi kelembagaan yaitu dengan merevisi Undang-undang Jaminan fidusia dan membuat Lembaga Parate Eksekusi. Saran dalam penelitian ini adalah 1) untuk Kreditur agar melakukan proses gugatan dengan menggunakan gugatan sederhana terhadap eksekusi jaminan fidusia. 2) untuk Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia agar merevisi Undang-undang Jaminan fidusia dan membuat Lembaga Parate Eksekusi yang diberi wewenang berdasarkan Undang-undang untuk melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang dapat memberikan kemudahan terhadap pelaksanaan eksekusi sehingga tidak diperlukannya lagi proses hukum acara perdata pada pengadilan negeri yang banyak memakan waktu dan biaya sehingga prosesnya pun tidak sebanding dengan nilai objeknya.

Kata Kunci: Fidusia, Gugatan Sederhana, Lembaga Parate Eksekusi

Abstract

The constitutional court decisions no. 1 puu-xvii / 18 / 2019 has removed lex specialis from act no 42 years 1999 on fiduciary security . Which had caused losses to for a creditor where could no longer protected a creditor the right for the losses suffered by his .Where civil judicial process comes from such a long and many of their time when debtors are not hand over any assurance in voluntary object .Highlights the difficulty in this research is 1) how alternative of execution for the fiduciary security in the aftermath of the award the constitutional court number puu-xvii / 18 / 2019 ? 2) how the concept to restore the function of parate execution in the act of fiduciary security ?The kind of research the thesis research was used in the law normative by using law events is as high as it was also found that 1) regulations the supreme court number 4 in 2019 at on changes to the supreme court number 2 the year 2015 on simple can be used as a means of settling a lawsuit as an alternative in resolving the problem execution fiduciary security shall 2) to the need to undertake the presence of institutional experimentation to revise the act of fiduciary security and make parate institutions execution .Advice in this research was 1) for his creditor to put in place the process of a lawsuit by using simple a lawsuit execution as the fiduciary security 2) For the government the unitary state of the republic of indonesia to revise the act of fiduciary security and make parate institutions execution that is given the authority based on the act to carry out the execution of an object fiduciary security shall who hoped to enable with the implementation of the execution so that it would not to the need again civil legal proceedings the event in the district court which many take time and the cost so that the process would not in proportion to the value of its object.

Keywords: Fiduciary, Small Cliam Court, Parate Execution Institution.